

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM pada tahun 2017-2019 sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan secara umum sudah baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dimitigasi oleh Kementerian ESDM, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi SDM belum memadai, Penerapan PIPK yang belum berkelanjutan dan terintegrasi, dan belum sinerginya pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi.

Secara detail kesimpulan per aspek terkait “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM” sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2017-2019 secara umum sudah baik dengan merujuk kepada karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diukur melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian ESDM yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Namun bukan berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sempurna, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dimitigasi oleh Kementerian ESDM agar dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Kementerian ESDM sebagai berikut:
 - a. Aspek relevan: Aspek relevan belum memenuhi secara utuh karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Dari sisi manfaat

penggunaannya, laporan keuangan Kementerian ESDM masih belum optimal dalam hal sebagai basis dalam pengambilan keputusan, belum banyak akun yang dijadikan dasar pengambilan keputusan, hal ini disebabkan karena efek kurangnya kompetensi SDM sehingga berdampak pada analisis atas pelaporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.

- b. Aspek andal: Aspek andal secara substansi telah memenuhi karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Pemenuhan aspek andal sudah teruji dengan opini yang mengindikasikan bahwa tidak ada salah saji secara material, dapat diverifikasi dan netral. Namun, berdasarkan opini BPK masih terdapat temuan pemeriksaan yang secara jumlah meningkat dari tahun 2017-2019 walaupun sejauh ini tidak melewati batas materialitas namun bukan tidak mungkin apabila hal tersebut terus terjadi akan berdampak pada materialitas. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dikaitkan juga dengan pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi dan pelaksanaan PIPK yang masih sebatas formalitas, serta komitmen pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- c. Aspek dapat dibandingkan: Aspek dapat dibandingkan telah memenuhi karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Keterbandingan laporan keuangan Kementerian ESDM sudah teruji sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan turunannya yang dibuktikan dengan konsolidasi tingkat LKPP yang tidak mengalami kendala sejauh ini.
- d. Aspek dapat dipahami: Aspek dapat dipahami belum memenuhi karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Laporan keuangan Kementerian ESDM sudah dapat dipahami secara internal dan Kementerian Keuangan selaku konsolidator LKPP, namun belum

ada informasi terkait pemahaman oleh stakeholder secara umum. Hal ini juga disebabkan karena laporan keuangan Kementerian ESDM periode 2017-2018 tidak *dipublish*, baru pada tahun 2019 di publikasi namun hanya sebatas halaman muka.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Saat ini kompetensi SDM pada Kementerian ESDM sudah cukup baik namun perlu untuk terus ditingkatkan, baik secara pemetaan pegawai maupun pemenuhan pendidikan dan pelatihan pada sektor keuangan negara khususnya terkait dengan pelaporan keuangan.
- b. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi, saat ini PIPK pada Kementerian ESDM masih sebatas menyelenggarakan format namun belum terinternalisasi dan terintegrasi dengan SPIP yang sudah berjalan terlebih dahulu.
- c. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi mengakselerasi proses pelaporan keuangan Kementerian ESDM. Dengan adanya aplikasi penyusun laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan menjadi efektif, efisien dan ekonomis. Hal yang perlu untuk mendapat perhatian adalah kompetensi dari sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut dan sinergitas antar operator/user aplikasi.

- d. Selain itu, faktor yang dapat memengaruhi kualitas suatu pelaporan keuangan adalah komitmen pimpinan dan komunikasi terkait prosedur transaksi dan proses bisnis yang dinamis.
3. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, diperlukan evaluasi terhadap tata kelola pelaporan keuangan pada Kementerian ESDM dengan cara melakukan pemetaan pegawai, sinergitas seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, pengendalian yang terintegrasi dan berkelanjutan serta penyusunan secara formal terkait siklus sistem informasi akuntansi secara manual.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM, penelitian ini menyarankan *continuous improvement* sebagai berikut:

1. Dari sisi kebijakan untuk meningkatkan aspek relevansi dan keandalan laporan keuangan:
 - a. Biro Keuangan selaku konsolidator laporan keuangan tingkat kementerian bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk membentuk forum komunikasi yang membahas formulasi prosedur transaksi pada masing-masing unit eselon I. Forum komunikasi tersebut berisi pejabat setingkat eselon III/jabatan fungsional madya, eselon IV/jabatan fungsional muda, dan para penyusun laporan keuangan di masing-masing unit eselon I. Forum ini dapat secara reguler maupun insidental melakukan pembahasan terkait formulasi prosedur transaksi terkait dengan proses bisnis yang khas pada masing-masing unit dikaitkan dengan prosedur akuntansi terkait bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan pada laporan keuangan.
 - b. Biro keuangan selaku konsolidator laporan keuangan tingkat kementerian menyusun modul atau petunjuk teknis terkait bagaimana menyusun laporan keuangan dan pengaturan akun-akun didalamnya.

Modul ini menjadi pedoman bagi tiap penyusun laporan keuangan, hal ini menjadi bermanfaat ketika misalnya ada mutasi atau personil yang bukan berlatar belakang akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Ilustrasi modul laporan keuangan yang peneliti usulkan sebagaimana pada lampiran VIII.

- c. Sebagai bagian dari SPIP, konsep PIPK yang mengusung pengendalian dan mitigasi risiko di akhir dari sebuah pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang baik. Penelitian ini menyarankan agar dapat digabungkannya konsep tersebut menjadi sebuah *grand design* konsep pada SPIP, sesuai dengan definisi SPIP dimana salah satunya adalah keandalan pelaporan keuangan, sehingga pengendalian yang dilakukan dapat terintegrasi, holistik dan tidak menimbulkan *redundant* pada saat implementasi. Diperlukan sinergitas antara unit pembina (BPKP dan Kemenkeu) agar tidak terjadi *overlapping* kebijakan yang bermuara pada kebingungan pada saat pelaksanaan.
2. Dari sisi kebijakan untuk meningkatkan aspek dapat dipahami, Biro Keuangan secara tahunan menyampaikan laporan keuangan versi utuh yang telah diaudit kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama untuk dilakukan publikasi pada *website* Kementerian ESDM dilengkapi dengan kuesioner/angket sehingga para stakeholder dapat memberikan masukan/umpan balik terkait konteks maupun konten dari laporan keuangan Kementerian ESDM.
3. Dari sisi organisasi untuk dapat meningkatkan seluruh aspek kualitas laporan keuangan:
 - a. Biro Keuangan bekerjasama dengan Biro SDM melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap pegawai yang berlatar belakang ekonomi secara umum maupun akuntansi secara khusus. Selanjutnya para lulusan akuntansi tersebut disebar ke bagian yang menangani

pelaporan keuangan pada seluruh satuan kerja minimal satu orang per satuan kerja.

Pada tahapan berikutnya, secara berkala dilakukan pembekalan berupa pemahaman dasar akuntansi pemerintahan kepada seluruh pengelola keuangan termasuk para pejabat dan jabatan terkait lainnya (perencanaan dan pelaksanaan anggaran) dapat melalui pendidikan dan pelatihan, *sharing session*, forum komunikasi maupun diskusi kelompok terpumpun (FGD). Sehingga terbentuk pola pikir atas kerangka dasar pelaporan keuangan, hal tersebut dibutuhkan karena pada dasarnya laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu siklus APBN sehingga cenderung diabaikan pada siklus-siklus awal pengelolaan keuangan negara, padahal laporan keuangan pintu masuk bagi pemeriksa untuk menilai suatu kinerja pengelolaan keuangan secara utuh.

- b. Perlu ditetapkannya dasar kebijakan pembentukan unit pengelola PIPK pada masing-masing unit eselon I yang sekaligus mengelola SPIP agar dapat melakukan penguatan-penguatan secara komprehensif dengan melihat parameter seperti jenis transaksi yang signifikan dan temuan pemeriksaan dikaitkan dengan proses bisnis secara umum. Pengendalian yang disusun berdasarkan parameter tadi dikelola dan dimitigasi secara berkelanjutan, sehingga dapat meminimalisir risiko kedepannya.
4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian misalnya pada tingkat pemerintah pusat secara umum serta dapat menggunakan faktor-faktor lain untuk lebih memperkaya sudut pandang terhadap kualitas laporan keuangan, misalnya pengelolaan BMN, pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adha, W., Rahmawati, V., & Al-Azhar, A. (2014). Pengaruh akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (studi empiris pada SKPD kota dumai). *Jom Fekon*, 1(2).
- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1253. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- Aminah, Khairudin, & Indrayenti. (2019a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Aminah, Khairudin, & Indrayenti. (2019b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen* (p. 319). [http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR - DASAR MANAJEMEN.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR-DASAR%20MANAJEMEN.pdf)
- Baturante, N., Kamase, J., & Nasaruddin, F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 117–127.
- Brown, A. (2021a). The accountable governance of provincial governments of a Pacific island country. *Public Money and Management*, 41(1), 55–64. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665363>
- Brown, A. (2021b). The accountable governance of provincial governments of a Pacific island country. *Public Money and Management*, 41(1), 55–64.

<https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665363>

- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian Kontemporer)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Prenadamedia Group.
- Cheng, M., Dhaliwal, D., & Zhang, Y. (2013a). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? *Journal of Accounting and Economics*, 56(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.03.001>
- Cheng, M., Dhaliwal, D., & Zhang, Y. (2013b). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? *Journal of Accounting and Economics*, 56(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.03.001>
- COSO. (2018). Enterprise risk management: Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks. *Enterprise Risk Management: Applying Enterprise Risk Management to Environmental, Social and Governance-Related Risks*, 300–317. <https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1–25.
- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Ehalaiye, D., Redmayne, N. B., & Laswad, F. (2021). Does accounting information contribute to a better understanding of public assets management? The case of local government infrastructural assets. *Public Money and Management*, 41(2), 88–98. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1719669>
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209.
- Fitriana, N., & Hoesada, J. (2019). *The Effect of Asset Management , Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), and Organizational Commitment on Quality of Financial Reporting (Survey at Ministry of Marine Affairs of Fisheries Republic Indonesia)*. 9771, 542–550. <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i10.001>
- Fitriani, A. (2017). Lingkungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (Survei Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah). *E Jurnal Katalogis*, 5(4), 113–122.
- Ghozali, I. (2020). *25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama, Semarang.
- Gultom, S. (2019). *Analisis Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Hubungan Antara Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26612>
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Sorot*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.31258/sorot.11.2.3890>
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi*. PT Gramedia Jakarta.
- Holbeche, L. (2017). *Designing More Agile Organisational Structures and Ways of Working*.
- Hope, O. K., Yue, H., & Zhong, Q. (2020). China's Anti-Corruption Campaign and

- Financial Reporting Quality. *Contemporary Accounting Research*, 37(2), 1015–1043. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12557>
- Huang, P., Guo, J., Ma, T., & Zhang, Y. (2015a). Does the value of cash holdings deteriorate or improve with material weaknesses in internal control over financial reporting? *Journal of Banking and Finance*, 54, 30–45. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.01.007>
- Huang, P., Guo, J., Ma, T., & Zhang, Y. (2015b). Does the value of cash holdings deteriorate or improve with material weaknesses in internal control over financial reporting? *Journal of Banking and Finance*, 54, 30–45. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.01.007>
- Ihsanti, E. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Chartered Accountant, Sistem Informasi dan Pengendalian Internal*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Irawan, A. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencapaian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah. *Ekspansi*, 10(1), 111–128.
- Iskandar, A., Amriani, T. N., & Subekan, A. (2017). Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua (Saiba) Pada Mitra Kerja Kppn Gorontalo Dan Marisa. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i2.65>
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *SOROT Vol 9 No 1 April Hal*.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa ke Masa*.
- Kementrian Keuangan RI. (2020). Apbn Kita 2019. *Kemenkeu.Go.Id*, April, 82. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>

- Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, 1(2), 141–146.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit STIM YKPN : Yogyakarta.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2000). *Management Information System*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi seiring Institusi-institusi kinerja organisasi . Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila. *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, 2, 230–244.
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. UJI Press. Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 14–30. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13550>
- Najati, I., Pituringsih, E., & Animah. (2016). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 1–18. <https://www.mendeley.com/catalogue/magister-pasca-sarjana->

universitas-mataram/

- Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-Bmn) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 45. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878>
- Nasution, D., Nasution, A. P., & Alpi, M. F. (2019). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi*, 43–51.
- Nurriksiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1–13.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rama, D. V., & Jones, F. L. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rewansyah, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. PT Rizky Grafis, Jakarta.
- Safitri, N. L. K. S. A., & Darsono. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(1), 122–133.
- Saleh, C., Islamy, M. I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Universitas Brawijaya Press.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pe. *Jurnal Online*

- Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, 4(1).*
- Sari, A. P., Martani, D., & Styaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas SDM Terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, April, 1–26.*
https://www.researchgate.net/publication/332188445_Pengaruh_Temuan_Audit_Tindak_Lanjut_Hasil_Pemeriksaan_dan_Kualitas_Sumber_Daya_Manusia_terhadap_Opinii_Audit_melalui_Tingkat_Pengungkapan_Laporan_Keuangan_KementerianLembaga
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). *Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Komeptensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. 1, 385–416.*
- Soetedjo, S. (2009). *Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam.* Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri, 4(71), 1–25.*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif).* CV Alfabeta, Bandung.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). *Accounting and Finance, Universitas Telkom, 4(1), 20–28.*
- Tampubolon, F. M., & Hasibuan, A. B. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, 3(1), 55.*
<https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415>
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi*

, *Sistem Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat*. 2(4), 125–135.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

Untary, N. R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi. *Universitas Diponegoro Semarang*, 2015.

Yadiati, W. (2007). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 96–106. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.09](https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.09)

Yusnita, T. E. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating*.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2017.

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2018.

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019.

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2017.

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2018

Kementerian ESDM. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019.

Kementerian ESDM. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2017 *Audited*.

Kementerian ESDM. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2018 *Audited*.

Kementerian ESDM. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019 *Audited*.

Kementerian ESDM. Laporan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian ESDM Tahun 2020.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Peneliti : Rahmat Rahim
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 15 November 1989
Alamat Rumah : Komplek Aneka Elok Blok A5 No 8
Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. 13940.
Nomor Telepon : 085242554455
Email : rahmatrahim@gmail.com
Status Perkawinan : Kawin
Nama Instansi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat Instansi : Jl. Medan Merdeka Selatan No.18
Gambir, Jakarta Pusat. 10110.
Nomor Telepon : (021) 3804242 ext.6057
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Pangkat /Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb
Riwayat Pendidikan : S1 – Ekonomi Akuntansi, Universitas Hasanuddin
Riwayat Pekerjaan : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian ESDM (2014-Saat ini)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



LAMPIRAN-LAMPIRAN

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA INFORMED CONSENT PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu Informan

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, saya:

Nama : Rahmat Rahim

NPM : 1963002023

Adalah mahasiswa Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Adiminstrasi Negara (STIA LAN) Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM”**. Atas hal tersebut, saya bermaksud untuk meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat dilakukan wawancara untuk melengkapi penelitian ini.

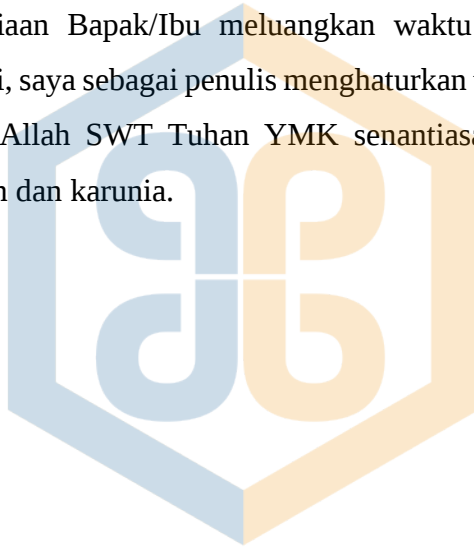
Waktu yang dibutuhkan dalam wawancara berkisar pada 30-45 menit, sementara metode yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Peneliti juga dapat menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian.

Pelaksanaan wawancara direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. Mohon izin menyampaikan bahwa

wawancara pada setiap informan berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti.

Segala informasi yang diperoleh dalam proses wawancara ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademis dan saya akan menjamin kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian yang berlaku. Jawaban Bapak/Ibu akan menjadi masukan yang sangat penting bagi penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu dan memberi informasi terkait penelitian ini, saya sebagai penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT Tuhan YMK senantiasa memberikan Bapak/Ibu kesehatan, kekuatan dan karunia.



Hormat Saya

Rahmat Rahim

NPM.1963002023

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PEDOMAN WAWANCARA

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari:

Waktu mulai dan selesai:

II. Identitas Informan

Nama:

Jabatan:

Pendidikan terakhir:

III. Pertanyaan penelitian:

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang berkualitas? apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah berkualitas?
2. Mengapa diperlukan laporan keuangan yang berkualitas?
3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas?

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM?

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM?
3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di Kementerian ESDM yang berulang, bagaimana Bapak/Ibu menyikapi ini?

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemanfaatan SIA di Kementerian ESDM apakah mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan?



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti : Rahmat Rahim
Lokasi penelitian : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pelaporan keuangan pada level kementerian pada Biro Keuangan, Kementerian ESDM

Aspek yang diamati:

1. Mengamati rutinitas kegiatan pelaksanaan pelaporan keuangan
2. Mengamati sarana dan prasarana pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Mengamati SDM pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Mengamati aplikasi serta penginputan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Peneliti

Rahmat Rahim
NPM.1963002023

Lampiran III

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Peneliti : Rahmat Rahim
Lokasi penelitian : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mendukung validitas data yang lebih akurat, peneliti juga menggunakan pedoman dokumentasi dalam melakukan telaah dokumen untuk melengkapi wawancara maupun observasi. Adapun dokumen yang ditelaah sebagai berikut:

1. Regulasi berupa peraturan perundang-undangan beserta turunannya sebagai dasar dalam pelaksanaan pelaporan keuangan.
2. Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran Kementerian ESDM hingga Standar Operasional Prosedur pada Biro Keuangan Kementerian ESDM.
3. Laporan Keuangan Kementerian ESDM.
4. Laporan BMN Kementerian ESDM.
5. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.

Peneliti

Rahmat Rahim
NPM.1963002023

Lampiran IV

TRANSKRIP WAWANCARA 3

I. Jadwal Wawancara

Tanggal: 24 Mei 2021

Waktu mulai dan selesai: 10:50

II. Identitas Informan

Nama: I

Jabatan: Auditor Internal

Pendidikan terakhir:

III. Pertanyaan penelitian:

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang berkualitas? apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah berkualitas?

Kualitas laporan keuangan itu terpenuhi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah apabila opini atas laporan keuangan itu memperoleh wajar tanpa pengecualian.

2. Kalau melihat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada standar akuntansi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKKL terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hal ini?

Menurut saya, untuk aspek relevan seperti prediktif belum banyak digunakan dalam kementerian ini. Sebenarnya informasi yang disajikan sudah cukup relevan namun itu bahwa apakah informasi itu banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, menurut saya belum. Kalau di tingkat LKPP saya lihat sudah cukup baik ya, banyak menggunakan informasi-informasi di laporan keuangan seperti manajemen aset, bagaimana melihat potensi aset yang kita miliki. Sayang sekali menurut

saya kita belum banyak menggunakan informasi-informasi di laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan di ESDM ini menurut saya sejauh ini hanya mengejar bagaimana bisa WTP. Untuk keandalan saya tidak meragukan karena sudah WTP. Untuk aspek dapat dibandingkan, secara internal saya lihat sudah dijalankan bahwa sesuai dengan format dari Kemenkeu, untuk eksternal menurut saya juga sudah. Dalam artian ketika Kemenkeu mengompilasi menjadi LKPP tidak terdapat permasalahan sejauh ini, artinya memang sama dengan LKKL lainnya. Kalau handal ya pasti handal kan sudah WTP. Aspek dapat dipahami ini menurut saya yang berkaitan sama relevan tadi, seharusnya kita bisa mengomunikasikan seperti apa posisi laporan keuangan kita kepada para pengambil keputusan agar dapat memahami isi dari laporan keuangan ini dan diharapkan menjadi bahan pengambilan keputusan.

3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas?

Menurut saya itu tadi bagaimana kita mengomunikasikan fungsi-fungsi laporan keuangan ini kepada para pengambil keputusan, kepala-kepala satuan kerja agar bisa memaksimalkan fungsi laporan keuangan tadi.

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Pastinya, SDM itu adalah orang yang menyusun laporan keuangan, jadi sangat bergantung kepada mereka kualitas laporan keuangan kita.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM?

Menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau saya ditanya, saya maunya harusnya penyusun laporan keuangan itu latar belakang akuntansi, tp realitasnya bahwa keterbatasan personil dan lulusan akuntansi mau tidak mau ya kita memaksimalkan SDM yang ada. Bahkan latar belakang

akuntansi pun itu harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan. Akuntansi yang dipelajari di kampus itu mayoritas sektor komersil bukan sektor pemerintahan. Yang terpenting sebenarnya filosofi dari akuntansi itu. Bisa saja satu orang itu melakukan penjurnalan namun mengapa harus jurnal itu hanya sedikit yang memahami.

3. Bagaimana kalau dari sisi pendidikan dan pelatihan? Apakah sudah memadai atau belum?

Seperti yang saya katakan bahwa itu yang kita butuhkan. Diklat di kita terkait akuntansi itu masih sangat kurang, bukan hanya terkait keuangan secara umum ya tapi harus akuntansi pemerintahan. Kami dari inspektorat selalu berusaha memberi pemahaman kepada tim saya, stakeholder yang saya temui melalui rapat dan pertemuan-pertemuan. Dari sisi kementerian ini saya lihat hanya berpatokan/sibuk kepada rekomendasi dari pemeriksa eksternal sehingga untuk mengembangkan SDM sendiri sudah tidak ada waktu.

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Tentu berpengaruh, karena SPI merupakan salah satu penilaian dalam pemberian opini atas laporan keuangan.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM?

PIPK sudah dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, berdasarkan PMK kemudian Kepmen ESDM.

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana Bapak/Ibu menyikapi ini?

Pertama kita mengasumsikan bahwa banyaknya temuan ini tidak signifikan, karena memperoleh opini WTP. Kemudian kalau dikaitkan dari sisi PIPK

tadi, kita sudah melaksanakan secara formal, format-format sudah kita susun untuk mendukung pelaksanaan PIPK. Namun menurut saya perlu adanya Satgas khusus yang secara berkelanjutan melihat pelaksanaan PIPK ini.

4. Kalau kita lihat kan pelaksanaan PIPK ini kan dibagi menjadi tiga, ada pelaksana, penilai dan reviu. Reviu ini dilaksanakan oleh APIP, kalau kita melihat hasilnya sejauh ini efektif sementara temuannya berulang. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu?

Itu yang saya sampaikan bahwa kita butuh Satgas, ini berbeda dengan tim penilai. Kalau tim penilai itu kan menilai secara periodik, namun kalau Satgas ini secara terus-menerus memonitor dan mengevaluasi risiko dan pengendalian. Hasil efektif itu secara formal melihat hasil penilaian dari tim penilai.

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Sangat menolong dalam keseragaman dan kecepatan untuk penyusunan laporan keuangan.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemanfaatan SIA di Kementerian ESDM apakah mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan?

Saya melihat sistem ini sudah baik ya, namun sebagai orang akuntansi saya melihat bahwa sistem ini harusnya bisa lebih baik lagi untuk dikembangkan.

3. Strategi apa yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sistem bisa lebih optimal, kan terkadang ada ditemukan error juga?

Menurut saya itu balik lagi ya bahwa dari sisi kompetensi SDM harus ditingkatkan. Aplikasi itu hanya *tools*, memang memudahkan tapi secara substansi kita tetap harus menguasai sehingga apabila terdapat kesalahan bisa langsung kita identifikasi dan temukan jalan keluarnya.

4. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian?

Pemahaman akuntansi pada tingkat pimpinan. Minimal pimpinan tau bahwa apa itu laporan keuangan dan fungsinya seperti apa sehingga mereka bisa mensupport para bawahan apabila sedang dalam penyusunan laporan keuangan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran V

TRANSKRIP WAWANCARA 7

I. Jadwal Wawancara

Tanggal: 31 Mei 2021

Waktu mulai dan selesai: 19:00

II. Identitas Informan

Nama: R

Jabatan: Kasubdit Dit APK, Kemenkeu

Pendidikan terakhir:

III. Pertanyaan penelitian:

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

1. Berdasarkan data bahwa laporan keuangan Kementerian ESDM memperoleh WTP dalam 4 tahun terakhir, bagaimana posisi KESDM di antara K/L lain terkait dengan pelaporan keuangan?

Setiap kementerian mempunyai karakteristik masing-masing, ada beberapa K/L lain yang bisa disamakan melihat karakteristiknya. KESDM ini kami lihat untuk skala LKPP termasuk salah satu K/L yang signifikan dan strategis baik dari sisi aset, belanja, pendapatan dan regulator. Karena KESDM ini mempengaruhi belanja bendahara umum negara (BUN) seperti belanja subsidi listrik, subsidi migas, aset migas, aset pertambangan. Secara umum kami melihat progresnya cukup baik ya dari tahun ke tahun, dari sisi PNBPN yang merupakan penyumbang PNBPN terbesar sudah semakin baik ya baik dari sisi minerba maupun migas walaupun temuan selalu ada dari tahun ke tahun. Dari sisi belanja secara umum baik, penyerapan termasuk tinggi dan dari sisi pelaporan keuangan relatif baik, yang agak menjadi kendala dari sisi aset/bmn, karena KESDM ini juga secara tusi termasuk kompleks karena memiliki aset yang akan di PMN kan, diserahkan kepada masyarakat dan KDP sendiri.

2. Berdasarkan data LHP BPK RI 3 tahun terakhir menunjukkan masih terdapat kelemahan-kelemahan terkait laporan keuangan Kementerian ESDM khususnya pada sektor SPI, bagaimana tanggapan bapak/ibu selaku pembina melihat fenomena ini?

Kami melihat perlu ada penekanan disisi penyusun laporan keuangan dan APIP. Melihat tren seperti itu harusnya bisa jadi penekanan bagi manajemen untuk melihat ada hal yang perlu dikuatkan dan ditindaklanjuti. Yang utama memang kami melihat komitmen pimpinan yang harus ada untuk menguatkan kelemahan-kelemahan ini.

3. Bagaimana dari kalau sisi karakteristik kualitatif LK di SAP?

Secara general LK KESDM sudah memperlihatkan karakteristik tersebut. Dari sisi relevan, terkait dengan transaksi yang relevan terjadi di KESDM dan update termasuk pengungkapannya. Untuk keandalan saya yakin karena dihasilkan dari suatu sistem yang terintegrasi dan sudah banyak level pengujian baik dari level satker hingga kementerian. Dari sisi dapat dibandingkan, sudah dapat dibandingkan dengan KL lain karena sudah menggunakan sistem serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Untuk dapat dipahami, kami melihat secara umum dapat dipahami oleh para pembaca laporan keuangan tersebut.

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Jadi memang untuk SDM pasti akan ada pengaruhnya. Suatu hal klasik namun tidak bisa dihindari, artinya dalam hal teknis kemampuan menyusun maupun sisi manajerial yang akan mengelaborasi menjadi suatu laporan keuangan kementerian sangat dibutuhkan.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM?

Kalau saya melihat kompetensi SDM di KESDM cukup beragam, ada yang relatif cukup advance namun di beberapa satuan kerja saya melihat ada juga yang masih perlu terus dibimbing, yang dibutuhkan saat ini adalah analisa atas laporan keuangan tersebut.

Strategi kami dari Kemenkeu dari segala lini ya bagaimana mengedukasi para pengelola keuangan di K/L. Dari level KPPN/Kanwil itu menghandle level satker dan unit eselon 1, sementara level K/L dari Direktorat APK. Di samping kami memiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

1. Berdasarkan PMK 17 Tahun 2019 tentang PIPK, masing-masing entitas melaksanakan PIPK untuk mendukung pelaporan keuangan dan memitigasi risiko-risiko yang dapat timbul, menurut Bapak/Ibu sejauh ini bagaimana efektivitas pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM?

PIPK ini merupakan hal baru yang dikoordinasikan oleh Itjen Kemenkeu. Kami melihat ini kan dilakukan oleh bagian/unit relatif baru berkecimpung di pengendalian intern. Beberapa K/L bahkan belum memiliki unit kepatuhan internal yang perlu terus mendapat pendampingan baik dari APIP internal maupun dari Kemenkeu bahkan BPKP.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM?

Karena ini merupakan hal yang baru kami belum bisa menilai secara komprehensif namun saat ini terlihat KESDM sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pengendalian internalnya.

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana Bapak/Ibu menyikapi ini?

Kalau kami melihat, sebaiknya memang setiap K/L itu memiliki komite audit yang memiliki tugas dan fungsi untuk menilai dan memitigasi risiko yang dianggap signifikan sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan fokus.

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA dalam hal ini aplikasi penyusun laporan keuangan memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Sistem aplikasi merupakan salah satu unsur paling penting untuk penyusunan laporan keuangan. Bagaimana akurasi, kecepatan dan kemudahan dalam memproses sebuah transaksi keuangan yang bahkan sampai mengonsolidasikan laporan keuangan hingga level kementerian bahkan LKPP.

2. Strategi apa yang dilakukan Dit APK selaku pembina K/L dalam penggunaan sistem informasi untuk memaksimalkan fungsi pelaporan keuangan?

Terus mengembangkan fitur dan fungsi dari aplikasi itu sendiri, dalam waktu dekat di tahun 2022 kami akan merilis sistem aplikasi SAKTI yang terintegrasi untuk penyusunan LKPP.

3. Berdasarkan data, seluruh aplikasi penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM berasal dari Kementerian Keuangan, terkadang terdapat permasalahan pada aplikasi tersebut, dan menjadi tameng bagi penyusun laporan keuangan atas kesalahan tersebut. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi fenomena ini?

Menurut saya itu merupakan hal yang wajar dilakukan karena tidak ingin disalahkan atas suatu kesalahan yang terjadi walaupun sebenarnya kalau ditelusuri tidak semua murni karena kesalahan aplikasi. Yang perlu diluruskan adalah bahwa aplikasi itu hanya sebuah *tools*. Cara kerja dari aplikasi ini yang perlu kita pahami dulu, kami juga sebenarnya menyediakan

menu untuk melakukan penyempurnaan apabila terjadi kekeliruan namun kami terus berupaya agar aplikasi ini dapat bekerja secara optimal.

4. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian?

Komitmen pimpinan sangat mempengaruhi jajaran dibawahnya dalam pelaporan keuangan. Hal ini sudah kami buktikan, ketika beberapa kali bertemu dengan K/L yang bisa dikatakan pimpinannya kurang memberi perhatian, itu berdampak kepada laporan keuangan yang dihasilkan. Di samping itu, mengikuti proses bisnis dan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkeu menjadi salah satu faktor penentu dalam penyusunan laporan keuangan.



Lampiran VI

TRANSKRIP WAWANCARA 11

I. Jadwal Wawancara

Tanggal: 25 Mei 2021

Waktu mulai dan selesai: 15:00

II. Identitas Informan

Nama: I

Jabatan: Pejabat Tinggi Pratama

Pendidikan terakhir:

III. Pertanyaan penelitian:

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

1. Menurut Bapak/Ibu apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah berkualitas? Indikatornya apa?

Kalau dikatakan berkualitas ya sudah berkualitas lah. Capaian organisasi dalam beberapa tahun terakhir yang memperoleh WTP menjadi salah satu indikator. Itu kalau dari sisi ukuran pelaporan keuangan.

2. Kalau melihat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada standar akuntansi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKKL terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hal ini?

Ya SAP itu merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan salah satu indikator dalam penentuan opini oleh BPK. Ketika BPK menyatakan opini WTP, berarti dapat disampaikan bahwa karakteristik kualitatif tadi terpenuhi dengan sendirinya.

3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas?

Harus ada integrasi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Selama ini yang saya lihat jalan masing-masing, koordinasi ada tapi belum maksimal, masih cenderung silo-silo.

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Pastinya. SDM itu adalah aset ya, laporan keuangan ini berbicara bagaimana penggunaan dan pengelolaan APBN dalam satu periode tertentu, yang menggunakan adalah manusia dan outputnya pun misalnya aset atau kebijakan dan sebagainya itu untuk manusia, jadi yang paling bisa menerjemahkan itu semua yaa manusianya.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM?

Di dalam struktur pemerintahan Indonesia, ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang ketika diangkat menjadi ASN, diantaranya administrasi negara, hukum, dan akuntansi. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak memahami ketiga hal tadi, ketika berbicara akuntansi, ini sebenarnya berbicara pengelolaan keuangan siklus APBN secara keseluruhan. Ilmu akuntansi itu spektrumnya luas untuk sisi pemerintahan, tidak hanya laporan keuangan tapi juga dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran itu semua akuntansi, cuma kita terkadang mengecilkan sendiri cakupan akuntansi ini, dan juga bisa dipahami bahwa tidak semua pegawai yang mengelola APBN itu berlatar belakang akuntansi atau menguasai akuntansi. Sebenarnya tidak perlu semua sarjana akuntansi, setiap unit misal ada 2-3 akuntan yang bisa memandu, tapi hal itu perlu adanya kursus-kursus akuntansi secara rutin agar bisa memahami alur atau pola kerja dari akuntansi itu sendiri, karena di pemerintahan itu menurut saya tidak sesulit akuntansi di sektor bisnis yang berkembang sangat pesat dan cepat.

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Iya berimplikasi, bagus ada PIPK ini karena melihat bagaimana pelaksanaan SPI khususnya terkait pelaporan keuangan.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM?

PIPK ini kan berangkat dari SPIP, pertama menentukan akun-akun signifikan yang material dan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengendalian atas akun-akun ini yang dibuat secara khusus, tapi harus kita lihat secara komprehensif. Maksudnya adalah PIPK ini kan bagian dari SPIP, jadi jangan dipisahkan sama SPIP secara keseluruhan. Oke PIPK terkait pelaporan keuangan, namun sisi teknis itu harus jalan juga SPI nya, tidak bisa kita hanya melihat PIPK nya jalan tapi SPI nya tidak, itu sia-sia. SPIP itu sesuatu yang integral, begitu pun dengan pelaporan keuangan. Tadi kita bicara akuntansi kan secara keseluruhan ya, jangan dipersempit maknanya, begitu pula dengan pelaporan keuangan, tidak hanya sekedar menyajikan angka-angka tapi substansi dari pelaksanaan APBN secara utuh tercermin di laporan keuangan itu, dari hulu ke hilir harus dibenahi dan disinergikan.

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana Bapak/Ibu menyikapi ini?

Itulah mengapa ada penilaian maturitas SPIP. Ini dilakukan untuk menilai seberapa matang sih SPIP suatu unit, filosofinya adalah sebenarnya *soft control* bagaimana manusianya menginternalisasi nilai-nilai SPIP ini, bukan hanya sekedar *hard control* dalam hal ini dokumen-dokumen secara fisik. Menurut saya itu yang saat ini perlu untuk ditanamkan ya, tidak hanya sekedar formalitas saja, besok-besok ketika lingkup pemeriksaan berubah

kalau hanya mengandalkan *hard control* saja susah, harus dari kesadaran manusianya.

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan?

Sangat penting, di masa sekarang ini penggunaan SIA yang terotomasi menjadi kewajiban ya untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas data dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Strategi apa yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sistem bisa lebih optimal, kan terkadang ada ditemukan error juga?

Kalau pun ada kesalahan, kita lihat dulu posisi salahnya dimana, kalau memang di sistemnya, harusnya kita bisa mendeteksi juga, langsung kita laporkan ke Kemenkeu selaku pengembang sistem tersebut. Tapi apabila di kita, kita harus segera melakukan koreksi, dan kita harus memahami apa yang keliru dari sebuah transaksi tadi, dan punya rencana cadangan apabila memang membutuhkan waktu terkait perbaikan dari Kemenkeunya.

3. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian?

Dari sisi komitmen pimpinan. Ketika pimpinan komitmen sudah baik maka kebawahnya lebih mudah. Karena siklus pelaksanaan APBN ini kan pelaporan keuangan di hilir, sehingga terkadang agak dilupakan.

Lampiran VII

Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan keuangan pada Biro Keuangan Kementerian ESDM

Pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.30 WIB



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan keuangan pada Biro Keuangan Kementerian ESDM

Pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 10.00 WIB



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran VIII

Ilustrasi format petunjuk teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM

Yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

SURAT EDARAN

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL YANG BERSIFAT KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral yang memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khas, maka disusun Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan:

1. sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; dan

2. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Bagian Anggaran 020).

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

A. Pendapatan Sumber Daya Alam

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam pada Kementerian ESDM terdiri atas penerimaan:

A.1. Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara

A.1.1 Pendapatan Iuran Tetap – Laporan Operasional (LO)

Iuran Tetap/Landrent/Deadrent iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan Iuran Tetap-LO dilakukan dengan metode *Self Assessment*, yaitu sistem pemungutan iuran tetap yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Bayar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya iuran tetap yang harus dibayar. Wajib bayar kemudian menyetorkan ke kas negara sesuai dengan perhitungan *self assessment*.
- 2) Pendapatan diakui pada saat:
 - a) Kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan/atau
 - b) hak atas pendapatan iuran tetap yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan berdasarkan surat tagih yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba.
- 3) Dalam hal pendapatan iuran tetap yang sudah disetorkan ke rekening kas

negara sesuai dengan BPN dan teridentifikasi sebagai hak tagih iuran tetap tahun berikutnya, maka dilakukan penyesuaian pendapatan iuran tetap-LO tahun berjalan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan Iuran Tetap – LO diukur sebesar:
 - a) Nilai nominal sesuai dengan bukti penerimaan negara; dan/atau
 - b) Nilai nominal hasil verifikasi dan evaluasi berdasarkan surat tagih.
- 2) Besaran tagihan iuran tetap menggunakan tarif PNBP formula tertentu, yaitu memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi menghasilkan lebih setor PNBP, wajib bayar dapat mengajukan kompensasi dengan syarat harus dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan iuran tetap – LO disajikan di pos pendapatan kegiatan operasional di laporan operasional
- 2) Pendapatan iuran tetap – LO diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan komponen laporan operasional secara memadai

d. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan data *Minerba One Data Indonesia* (MODI) per 2 Januari tahun berjalan kepada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai dasar perhitungan iuran tetap tahun berjalan.
- 2) Pembayaran ke rekening kas negara dilakukan oleh wajib bayar paling lambat tanggal 10 Januari tahun berjalan
- 3) Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menginventarisasi dan mengevaluasi data kewajiban yang diperoleh dari data MODI dengan data

setoran ke kas negara sesuai periode pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan iuran tetap-LO antara lain Bukti Pembayaran/Penerimaan Negara dan rekapan penerimaan negara iuran tetap sesuai pengelompokan tahun kewajiban.

- 4) Apabila terdapat kewajiban yang masih harus dibayar, data penerimaan tersebut diproses oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara dengan menerbitkan surat pemberitahuan dan selanjutnya akan diterbitkan surat tagih oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPP.
- 5) Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara kemudian menyampaikan rekapan penerimaan negara iuran tetap sesuai pengelompokan tahun kewajiban, surat tagih tersebut kepada Sekretariat c.q. Bagian Keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan paling lambat 30 juni tahun berjalan.
- 6) Sekretariat menyajikan pendapatan iuran tetap pada laporan keuangan. Bukti Pembayaran/Penerimaan Negara dan rekapan penerimaan negara iuran tetap sesuai pengelompokan tahun kewajiban, memo jurnal penyesuaian (akrual).

e. Jurnal

- 1) Jurnal untuk mencatat pendapatan iuran tetap yang telah disetorkan ke kas negara

Kode Akun	Dr/Kr	Nama Akun	Keterangan
313121	Dr	Diterima dari Entitas Lain	LPE
42132X	Kr	Pendapatan Pertambangan Iuran Tetap	LRA / LO

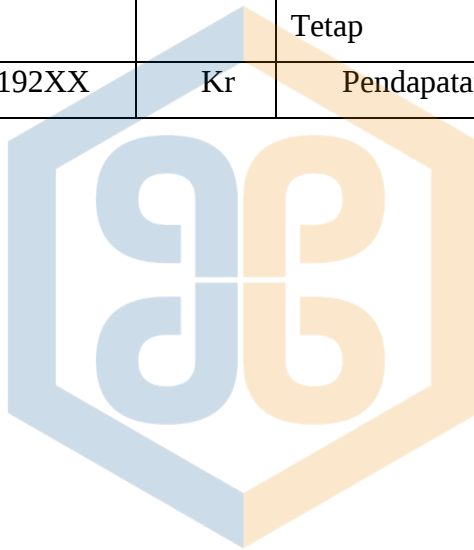
- 2) Jurnal untuk mencatat pendapatan iuran tetap berdasarkan surat tagih

Kode Akun	Dr/Kr	Nama Akun	Keterangan
115211	Dr	Piutang PNB	Neraca

42132X	Kr	Pendapatan Pertambahan Iuran Tetap	LRA / LO
--------	----	------------------------------------	----------

- 3) Jurnal untuk mencatat pendapatan yang teridentifikasi sebagai hak tagih iuran tetap tahun berikutnya

Kode Akun	Dr/Kr	Nama Akun	Keterangan
42132X	Dr	Pendapatan Pertambahan Iuran Tetap	LRA / LO
2192XX	Kr	Pendapatan Diterima Dimuka	Neraca



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A